

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN DAN PEMBERATAN  
DI WILAYAH SURABAYA  
Putusan No.1836 / Pid. B / 2010 / PN. SBY**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum UPN "VETERAN" Jawa Timur**



**Oleh :**

**ARDI NUGRAHANTO**  
**NPM. 0671010048**

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2011**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN DAN PEMBERATAN  
DI WILAYAH SURABAYA**

**Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :  
(1836/Pid.B/2010/PN.Sby)**

Disusun oleh :

**ARDI NUGRAHANTO**  
**NPM. 0671010048**

**Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
“Veteran” Jawa Timur  
Pada tanggal : 10 JUNI 2011**

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. Hariyo Sulistiyantoro.S.H.,MM. : (.....)  
NIP. 19620625 199103 1 001
2. H. Sutrisno.S.H.,M.Hum. : (.....)  
NIP. 19601212 198803 1 001
3. Subani SH, MSi. : (.....)  
NIP. 19510504 198303 1 001

**Mengetahui**  
**DEKAN**

Hariyo Sulistiyantoro.S.H.,MM.  
NIP. 19620625 199103 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNYA, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN PEMBERATAN DI WILAYAH SURABAYA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1836/Pid.B/2010/PN.Sby) ”** dapat terselesaikan.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Wadep I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan Selaku Dosen Pembimbing Utama.
3. Bapak Subani, S.H., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Fauzul Aliwarman, Shi, M.Hum, sebagai Pembimbing Pendamping yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Moch. Sholeh, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara.
7. Bapak Misdianto S.H., selaku Kanit Reserse di Polsek Sukolilo Polrestabes Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara.
8. Bapak Widodo S.H., selaku Kepala penjaga berkas acara perkara (BAP) Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kedua orang tuaku tercinta, serta kedua kakakku, tersayang dan seluruh saudara-saudara yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa dan restunya selama ini.
10. Bunda dan mbak Dian di kantin Pusat untuk do’a restunya.
11. Teman-teman seperjuangan Shafareza Adhi Negara, Argo Kristinantoro S.H., Ari Handoko S.H., Reza Wahyu, Ricky Herdian, Rey Kristyansah dan seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

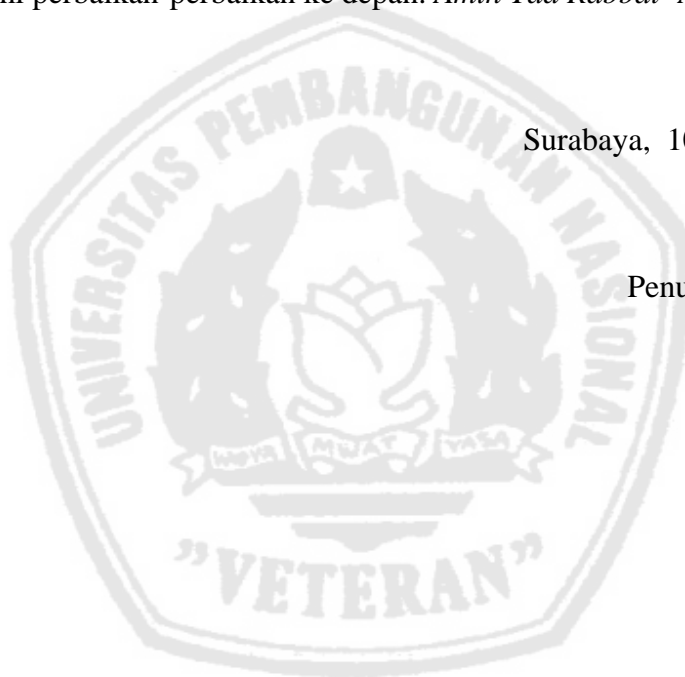
12. Teman-teman dari Universitas Airlangga yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan di sisi Allah SWT sebagai amal ibadah, Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. *Amin Yaa Rabbal 'Alamiin.*

Surabaya, 10 Juni 2011

Penulis



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI</b>	
<b>UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI...</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	6
1.5.1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	6
A. Pengertian Tindak Pidana.....	6
B. Tujuan Hukum Pidana.....	7
C. Unsur-unsur Hukum Pidana.....	8

1.5.2. Azas-Azas Hukum Pidana.....	9
1.5.3. Azas-azas Hukum Acara Pidana.....	11
1.5.4. Pelaku Tindak Pidana.....	12
1.6. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	13
1.6.1. Tindak Pidana Pencurian.....	13
1.6.2. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian.....	17
1.6.3. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	17
1.6.4. Tindak Pidana Kekerasan.....	19
1.7. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.....	21
1.7.1. Turut Serta.....	21
1.7.2. Pengertian Ilmu Kriminologi.....	22
1.8. Metode Penelitian.....	23
1.8.1. Jenis Penelitian.....	23
1.8.2. Pendekatan Masalah.....	24
1.8.3. Sumber Bahan Hukum.....	24
1.8.4. Metode Pengumpulan Data.....	26
1.8.5. Analisa Data.....	26
1.8.6. Sistematika Penulisan.....	27

## **BAB II IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

<b>TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN PEMBERATAN.....</b>	<b>29</b>
2.1. Indentifikasi Perkara Putusan No. 1836/Pid. B/2010/PN.Sby.....	29
2.2. Analisa Kasus.....	31

2.3. Ancaman Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan.....	34
2.4. Putusan Perkara (No.1836/Pid. B/2010/PN.Sby) Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan.....	37

**BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
YANG DISERTAI DENGAN PEMBERATAN.....**

3.1. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Suatu Kejahatan.....	41
3.2. Yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan.....	42
3.3. Cara Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan.....	45
3.4. Tabel Tentang Kasus Pencurian di Polsek Sukolilo Polrestabes Surabaya.....	46

**BAB IV PENUTUP.....**

4.1. Kesimpulan.....	48
4.2. Saran.....	49

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Ardy Nugrahanto  
NPM : 0671010048  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 09 Februari 1988  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN DAN PEMBERATAN DI WILAYAH  
SURABAYA**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu tindak pidana pencurian yang semakin merebah di masyarakat. Pencurian merupakan tindak pidana yang dapat merugikan orang lain. Salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. Pencurian dengan kekerasan dan pemberatan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan disertai kekerasan terhadap korbannya dan mengambil barang si korban. Biasanya pencurian ini dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pencurian dengan kekerasan biasanya dilakukan dengan cara penodongan, perampasan, penjambretan, perampokan, dan pembajakan. Sedangkan jika disertai dengan pemberatan, pelaku juga mengambil sebuah motor yang terdapat di tempat yang menjadi target aksi pencurian berlangsung. Latar belakang seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan diantaranya adalah faktor ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, ingin mendapatkan uang dengan mudah, lingkungan dan kesenjangan sosial. Maka sebaiknya semua masyarakat harus bisa bekerjasama dengan kepolisian untuk memberantas tindak pidana pencurian di dalam lingkup masyarakat. Supaya tindak pidana tersebut dapat dicegah dan dapat berkurang.

Kata kunci : Pencurian, faktor-faktor, kasus pencurian.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)<sup>1</sup>. Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia

Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata *mengambil* (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 346.

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif : *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*. “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.
- b. Unsur objektif :
  1. *Hij* atau barangsiapa.
  2. *wegnemen* atau mengambil.
  3. *eenig goed* atau sesuatu benda.
  4. *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap

orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.<sup>2</sup>

Maka sudah jelas bahwa pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Prof. Simons mengatakan : *“Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis”*. Yang artinya : “Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”.

---

<sup>2</sup> Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht* II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 106.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan memberikan suatu contoh kasus mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. Pada hari selasa tanggal 20 April 2010 sekitar jam 14.00 wib, di dalam rumah Jl.Dinoyo No.24 Surabaya, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan terhadap barang milik saksi korban Djuwita Tjandrakasih yang dilakukan oleh tersangka Riswan Alamsyah Bin Ruski (tertangkap), Tommy Haris Bin Haris (tertangkap), H. Sony Syafi'i Bin HM. Syafi'i (tertangkap), Burhanuddin Bin Muh. Yusuf Als. Taufik (tertangkap), Hasanuddin Bin Hafid Als. Udin Als. Budi (tertangkap), dan Arnold Azis Lalo (DPO). Barang berupa uang tunai sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), perhiasan kalung emas dan liontin 4 gram, gelang emas 3 gram, dan giwang sepasang 2 gram dan mengakibatkan korban rugi total Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Atas kejahatan yang tersangka lakukan telah melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, subsidair Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Pencurian dengan kekerasan dan pemberatan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan di karenakan ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu.

Maka dari pihak instansi kepolisian harus lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dan pemberatan dalam lingkup masyarakat.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **tinjauan yuridis tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan di wilayah Jl. Dinoyo No.24 Surabaya** (Putusan No.1939 / Pid. B / 2010 / PN. SBY).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan penulis bahas dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dan pemberatan di Pengadilan Negeri Surabaya?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan pemberatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dan pemberatan di Pengadilan Negeri Surabaya.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan pemberatan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

a. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pembinaan hukum nasional.

b. Manfaat Praktis :

Penulis pada dasarnya dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pemerintah serta instansi-instansi hukum yang terkait, dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia.

#### **1.5 Kajian Pustaka**

##### **1.5.1 Tinjauan Tentang Tindak Pidana**

###### **A. Pengertian Tindak Pidana**

R. Abdoel Djamali, S.H mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*Delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran,

baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>3</sup>

Menurut Prof. Moeljatno, S.H pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup>

Menurut Prof. Simons tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada pelaku.<sup>5</sup>

Hari Saherodji mengatakan, bahwa Tindak Pidana merupakan suatu kejahatan yang dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan, serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh negara.

## **B. Tujuan Hukum Pidana**

Adapun tujuan dari hukum pidana, ialah :

2. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun

<sup>3</sup> *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm 493.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 54.

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 106.



menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).

3. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang tidak baik, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dan sekaligus masyarakat terhadap kejahatan dan pejabat.

Tujuan hukum pidana adalah memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum itu. Asas-asas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu sistem, (Susilo Prajogo, "Pengantar Hukum Pidana", Hal 115).

### **C. Unsur-unsur Hukum Pidana**

2. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
3. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 175.

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Menurut Abdoel Djamali, syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut:

1. Harus adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
  - a. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. Harus berlawanan dengan hukum.
  - c. Harus tersedia ancaman Hukumannya.

Hari Saherodji mengatakan, bahwa Tindak Pidana merupakan suatu kejahatan yang dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan, serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh negara.

### **1.5.2 Asas-asas Hukum Pidana**

Hukum pidana mempunyai asas-asas, yang menunjukkan sifat-sifat tertentu, sifat-sifat mana tidak tedapat dalam macam-macam hukum lainnya, yakni:

1. Sesuatu perbuatan itu boleh dihukum, jika berdasarkan peraturan pidana, yang telah ada terlebih dahulu (Pasal 1 ayat 1 KUHP).
2. Penafsiran peraturan-peraturan pidana itu hanya berdasarkan arti kata-kata, yang terdapat dalam peraturan pidana itu saja.
3. Tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan.
4. Hukum pidana menjatuhkan sanksinya, yaitu hukuman jika dilanggar.
5. Yang dapat dihukum hanya orang biasa saja, sedangkan badan hukum dan binatang tidak,

Selanjutnya masih ada 4 (empat) azas-azas hukum pidana, yang bertalian dengan berlakunya hukum pidana, yaitu:

6. Azas tritorialiteit : menurut azas ini, maka setiap orang baik orang indonesia, maupun orang asing yang telah melakukan kejahatan didalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, diadili oleh hakim Indonesia. Pada azas ini orang menitikberatkan kepada : dimana tindak pidana itu telah dilakukan.
7. Azas personaliteit aktif ( *azas nasionaliteit*) : menurut azas ini maka tiap-tiap orang Indonesia, baik ia ada di Indonesia, maupun ia diluar negeri, dikenakan hukum pidana Indonesia, dimana saja ia melakukan kejahatan. Dalam azas ini tekanan diletakkan kepada orang.
8. Azas *nasionaliteit pasif* (azas perlindungan) : menurut azas ini maka hukum pidana itu berlaku dimana saja dan terhadap siapa saja, jika

kepentingan-kepentingan nasional tertentu dilanggar atau dinodai, misalnya mengenai keamanan negara dan kepala negara, segel, merk dan lain-lain. Hal-hal tersebut harus diperlindungi.

9. *Azas universaliteit* : menurut azas ini tiap-tiap negara dengan hukum pidananya berkewajiban untuk menjaga dan memelihara jangan sampai ketertiban diseluruh dunia itu dapat dilanggar.<sup>7</sup>

### 1.5.3 Azas-Azas Hukum Acara Pidana

Untuk melaksanakan hukum acara pidana, ada beberapa asas-asas penting yang perlu diketahui. Adapun asas tersebut antara lain<sup>8</sup>:

1. Asas persamaan di muka hukum yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
2. Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent* yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak yaitu peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

<sup>7</sup> J.C.T. Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, cet. XI, Djakarta, 1962, hlm 224.

<sup>8</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 347.

4. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya yaitu setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

#### **1.5.4 Pelaku Tindak Pidana**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, dalam hal ini perbuatan pidana yang dilakukan adalah tindakan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.

Menurut KUHP, macam pelaku yang dapat dipidana terdapat pada Pasal 55 dan 56 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

a. Pasal 55 KUHP.

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
2. Pasal 56 KUHP.
  1. Dipidana sebagai pelaku kejahatan :
    - Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
    - Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

## **1.6 Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

### **1.6.1 Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.<sup>9</sup>

Perlu diketahui bahawa baik Undang-Undang maupun pembentuk Undang-Undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 15.

menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni:

1. Menurut Mr.Blok:

*Wegnemen is ene gedraging waardoor men het goed brengt in zijn feitelijke heerschappij, onder zijn macht, in zijne detentie, onafhankelijk van de bedoeling, die men ten opzichte van dat goed verder koestert.*<sup>10</sup>

Artinya:

Mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut.

2. Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemaijer:

*Wegnemen (in de zin van art. 310) is altijd een eigenmachtige inbezitneming.*

Artinya:

Mengambil (menurut pengertian Pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya.

3. Menurut Prof. Simons:

---

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 13.

*Wegnemen is het voorwerp tot zick nemen, het bregen onder zijne uitsluitende feitelijke heerschappi m.a.w de dader moet het voorwerp op het ogenblik der handeling niet reeds onder zick hebben.*<sup>11</sup>

Artinya:

Mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaanya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaanya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaanya.

4. Menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum:

*Wegnemen is iedere handeling, waardoor iemand of een vermogenbestanddel van een ander in zijn eigen herschappij brengt zonder mederwerking of toestemming van dia ander of de band, die op een of andere wijze nog tussen die ander en dat vermogenbestanddeel bestond, verbreekt.*<sup>12</sup>

Mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 362 tentang pencurian terdiri atas:

---

<sup>11</sup> *Op. Cit*, hlm 14.

<sup>12</sup> *Op. Cit*, hlm 14.



1. Unsur subyektif: *met het oogmerk om het zick wederrechtelijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
2. Unsur obyektif:
  - a. *Hij* atau barangsiapa.
  - b. *Wegnemen* atau mengambil.
  - c. *Eenig goed* atau sesuatu benda.
  - d. *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.<sup>13</sup>

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian yang telah dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *culpoos diefstal*.

Kesengajaan atau *opzet* pelaku itu meliputi unsur-unsur :

1. Mengambil.
2. Sesuatu benda.

---

<sup>13</sup> *Op. Cit*, hlm 2.

3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.<sup>14</sup>

### **1.6.2 Macam-macam Tindak Pidana Pencurian**

1. Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan.
2. Tindak Pidana Pencurian ringan.
3. Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan.
4. Tindak Pidana Pencurian dalam keluarga.

### **1.6.3 Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.<sup>15</sup>

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Menurut arrest Hoge Raad arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dari perumusan Pasal 365 KUHP dapat menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai

---

<sup>14</sup> *Op. Cit.* hlm 2.

<sup>15</sup> *Op. Cit.* hlm 56.

dengan ayat 4. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini adalah sebagai berikut :

Ayat (1) memuat unsur-unsur :

- Pencurian dengan :
  - Didahului.
  - Disertai.
  - Diikuti.
  - Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
- Unsur-unsur subyektifnya :
  - Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau,
  - Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu.<sup>16</sup>

Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur :

1. Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang.  
Misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain.
2. Maksud untuk “mempermudah pencurian”, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya : menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Op. Cit*, hlm 52.

<sup>17</sup> M. Sudradjat Bassar, *Tindak -tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karva, Bandung, 1986, hlm 71.

#### 1.6.4 Tindak Pidana Kekerasan

Menurut Prof Simons arti dari kekerasan adalah dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.

Menurut H.A.K Moch Anwar yang merumuskan arti dari kekerasan adalah sebagai perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak dengan (kekuatan fisik).

Sedangkan menurut pendapat dari R.Soesilo dalam mengartikan kekerasan adalah menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak syah (R.Soesilo, 1984: 123)

Menurut Lamintang P.A.F. dan C. Djisman Samosir Pasal 89 KUHP hanya mengatakan tentang melakukan kekerasan saja, bunyi dari pasal 89 KUHP adalah "yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

Menurut Prof. Simons, kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama, dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan di dalam rumusan Pasal 365 ayat 1 KUHP, yakni :

- a. Untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian yang akan dilakukan.

- b. Jika kejahatan yang mereka lakukan itu *op heterdaad betragt* atau diketahui pada waktu sedang dilakukan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta kejahatan dapat melarikan diri.
- c. Untuk menjamin tetap mereka kuasai benda yang telah mereka curi.

Menurut Mulyani W.K. kekerasan ada 4 macam yaitu:

1. Kekerasan legal.

Merupakan kekerasan yang didukung oleh hukum.

Misalnya: tentara yang melakukan tugas dalam peperangan.

2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya.

Misalnya: tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

3. Kekerasan rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan.

Misalnya: lalu lintas.

4. Kekerasan yang tidak berperasaan (*irrational violence*)

Kekerasan yang terjadi karena tanpa adanya provokasi terlebih dahulu tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban dikenal oleh pelakunya, (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, hal 59).

## 1.7 Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.

M. Sudradjat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat.

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok. Dan juga mempunyai unsur yang sama. Unsurnya yaitu :

- a. Unsur subyektif : dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.
- b. Unsur-unsur obyektif :
  1. Barang siapa.
  2. Mengambil.
  3. Sebuah benda.
  4. Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

### 1.7.1 Turut Serta

Menurut Pompe (*handbook van het nederlandse strafrecht*, 1995,

hal 214) adalah memberi “*bijdragen aan het strafbare feit, voorzover zij niet bestaan in het plegen*” yang artinya : memberi “bantuan tetapi tidak “membuat”, maka peristiwa pidana itu mungkin dilakukan.

Menurut Fon Feuerbach turut serta adalah :

- a. Mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana.
- b. mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang disebut pada huruf a, yaitu mereka yang tidak langsung berusaha.

### 1.7.2 Pengertian Ilmu Kriminologi

Pengertian tentang kriminologi menurut Michael dan Adler adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat. Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat. *Noach* merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi

meliputi :

- Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.
- Pelaku kejahatan.
- Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Sedangkan menurut Bonger yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi 5, yaitu :

1. Antropologi kriminal.

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis).

2 Sosiologi kriminal.

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

3 Psikologi kriminal.

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4 Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal.

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat saraf.

5 Penologi ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 30.



### 1.8.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.<sup>19</sup>

Pendekatan yang peneliti lakukan ini berdasarkan aturan-aturan dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang diatur sesuai dengan buku II Titel XXII tentang pencurian dan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan KUHP.

### 1.8.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ilmu hukum normatif, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.<sup>20</sup>

Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

#### 1. Sumber Bahan Hukum Primer

<sup>19</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 87.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 86.

Sumber Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Data primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## 2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, hal ini bisa berupa: Buku-buku Ilmu Hukum, jurnal Ilmu Hukum, laporan penelitian ilmu hukum, internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas :

- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cet. 2, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Djamali R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Lamintang, P.A.F, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Djakarta, 2009.

## 3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder seperti kamus, dan lain-lain<sup>21</sup>, Adapun petunjuk yang dipakai dalam skripsi ini terdiri dari :

- Kamus hukum.
- Kamus bahasa Indonesia.
- *Black's law dictionary*.

#### 1.8.4 Metode Pengumpulan Data

Metode atau cara untuk mengumpulkan data berbeda dengan cara pengumpulan data pada disiplin ilmu lain, perbedaan ini muncul karena apa yang dimaksud dengan data dalam ilmu hukum berbeda dengan makna data pada penelitian ilmu lain. Data yang dimaksud dalam penelitian ilmu hukum Normatif adalah apa yang ditemukan sebagai isu atau permasalahan hukum dalam struktur dan materi hukum positif yang diperoleh dari kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait.<sup>22</sup>

#### 1.8.5 Analisis Data

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 87.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 166.

keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan aspek yang lain dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Disamping memperoleh gambaran secara utuh, ditetapkan langkah selanjutnya dengan memperhatikan dokumen khusus yang menarik untuk diteliti yaitu kasus pencurian dengan kekerasan. Dengan demikian penelitian menjadi lebih fokus dan tertuju pada masalah yang lebih spesifik.<sup>23</sup>

#### **1.8.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman proposal ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri beberapa sub-sub :

Bab I pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini serta sistematika penulisan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Bab II, menguraikan tentang pengertian dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pada bab ini terdiri dari lima sub bab yaitu, pertama mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana. Kedua,

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 174.

mengenai pengertian tindak pidana dengan kekerasan. Ketiga, ancaman atau sanksi dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Keempat, tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kelima, ancaman atau sanksi dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Bab III, menguraikan . Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu, pertama implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. Kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan pemberatan.

Bab IV, penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

